

ABSTRACT

Women around the world are breaking barriers in political leadership, however their effect on female entrepreneurship is still underexplored. This study examines how increased female representation in political leadership influences female entrepreneurship rates across countries. Based on Institutional Theory, Gender Equality Theory, and Social Capital Theory, I argue that higher female political participation promotes more inclusive entrepreneurial ecosystems through better policy advocacy, resource access, and role modelling. Cross-sectional data from the Freedom in the World (FIW) and Global Entrepreneurship Monitor (GEM) datasets for 2022 is used to conduct a regression analysis, with GDP growth acting as a control variable. The study's findings suggest that political participation does not directly drive female entrepreneurship, emphasizing the importance of structural and cultural contexts. To empower women entrepreneurs, policymakers must address systemic barriers such as limited resources and institutional inefficiencies. Governments can promote gender equality in economic participation by creating more supportive environments for female entrepreneurship.

ABSTRAK

Perempuan di seluruh dunia terus menembus batas dalam kepemimpinan politik, namun pengaruh mereka terhadap kewirausahaan perempuan masih belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana peningkatan representasi perempuan dalam kepemimpinan politik memengaruhi tingkat kewirausahaan perempuan di berbagai negara. Berdasarkan *Institutional Theory*, *Gender Equality Theory*, dan *Social Capital Theory*, penelitian ini berargumen bahwa partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi dapat mendorong ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif melalui advokasi kebijakan yang lebih baik, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta peran sebagai panutan (*role model*). Data *cross-sectional* dari *Freedom in the World (FIW)* dan *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)* untuk tahun 2022 digunakan untuk melakukan analisis regresi, dengan pertumbuhan PDB (*GDP growth*) sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan tidak secara langsung mendorong tingkat kewirausahaan perempuan, menekankan pentingnya konteks struktural dan kultural. Untuk memberdayakan perempuan wirausaha, pembuat kebijakan perlu mengatasi hambatan sistemik seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakefisienan institusional. Pemerintah dapat mendorong kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kewirausahaan perempuan.